



**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh

RIRIZ SETIAWATI KUSUMA

NIM. 090810301007

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2013



**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

RIRIZ SETIAWATI KUSUMA

NIM. 090810301007

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2013

SKRIPSI

**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

Oleh

RIRIZ SETIAWATI KUSUMA

NIM. 090810301007

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Hendrawan Santoso Putra, SE, M.Si , Ak

Dosen Pembimbing II : Andriana, SE, M.Sc

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririz Setiawati Kusuma

NIM : 090810301007

Jurusan: Akuntansi Reguler – Pagi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 September 2013

Yang menyatakan,

Ririz Setiawati Kusuma
NIM 090810301007

METERAI
TEMPEL
Rp. 6000
B8D88ABF604647260
ENAM RIBU KEPYAS
DJP

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Kasus
pada Pemerintah Kabupaten Jember)

Nama Mahasiswa : Ririz Setiawati Kusuma

Nomor Induk Mahasiswa : 090810301007

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : S1 Akuntansi

Pembimbing I,



Hendrawan Santoso Putra, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740506 200212 1 006

Pembimbing II,



Andriana, SE, M.Sc
NIP. 19820929 201012 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Alwan Sri Kustono, M. Si, Ak
NIP. 197204162001121001

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ririz Setiawati Kusuma
NIM : 090810301007
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

27 September 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Kartika, S.E. M.Sc.Ak.
NIP. 19820207 200812 2 002

Sekretaris : Drs H. Djoko Supatmoko, Ak.
NIP. 19550227 198403 1 001

Anggota : Wahyu Agus Winarno, S.E. M.Sc. Ak.
NIP. 19830810 200604 1 001

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Jember

M. Fathorrazi

Dr. M. Fathorrazi, S.E. M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Mama dan papa saya tercinta, Ibunda Afiati dan Ayahanda Iksan Nirwana Kusuma. Terima kasih atas doa, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanannya yang tiada terhingga untuk mengiringi setiap langkah dari keberhasilanku;
2. Adikku tersayang, Fitria Dwi Kusuma dan Firmansyah Rizki Kusuma yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi motivasi;
3. Mbah Ibu dan Mbah Rama atas perhatian dan doanya;
4. Pakdeku Almarhum Aunur rofiq, terima kasih atas segala motivasi dan dorongannya;
5. Sahabat-sahabat yang selalu ada buat aku, Salsabila family '06 - '13 (khususnya untuk angkatan '09), adik sekamarku Devi, guru dan sahabat SMA, SMP ku dan semua dosen dan teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2009;
6. Kakak teristimewa yang selalu membantu;
7. Keluarga dan kerabat dekat;
8. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap
(Q.S. Al Insyirah: 5-8)

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan tetap menegakkan shalat, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar.”
(Q.S. Al Baqarah : 153)

Tak jadi soal apakah Anda berpikir anda akan berhasil atau tidak,
Anda tetap Benar
(Henry Ford)

“Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu memiliki hal-hal terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidupnya.”
(Penulis)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemda Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi; untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan untuk mengetahui model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dekriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis dekriptif. Berdasarkan analisis data sebelumnya maka kesiapan Pemda Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap. Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, kurangnya Bintel atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi. Model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain Pengembangan SAP Berbasis AkruaI sesuai dengan kebutuhan, penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis AkruaI sesuai dengan kebutuhan, Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan.

Kata kunci: kesiapan, komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the readiness of the Government of Jember indicated with commitment, human resources, facilities and information systems; to know the constraints in the implementation of Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standards (SAP) and to determine the acceleration of the implementation of the strategic model of PP No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards (SAP). Type of research is descriptive qualitative research. The research was conducted by taking object in Jember Regional Government. The type of data used in this study is primary data and secondary data. Methods of data analysis using descriptive analysis. Based on the previous data analysis Jember government readiness is indicated by the commitment, human resources, facilities and information systems can be concluded that the district government integrity is seen from the parameter set categories and human resources for preparedness, readiness and information systems infrastructure is a category quite ready . Constraints in the implementation of Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standards (SAP), among others, to date preparation LKPD still done manually (excel) no special software, the number of HR executive in quantity is not enough, lack Bintek or training , lack of socialization, existing facilities and infrastructure, but still not sufficient. Acceleration of the implementation of the strategic model of PP. 71 of 2010 on Government Accounting Standards (SAP), among others Accrual-Based SAP Development according to the needs, preparation of Accrual-Based SAP Technical Bulletins as needed, Human Resource Development in the Field of Government Accounting.

Keywords: readiness, commitment, human resources, facilities and information systems

RINGKASAN

Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember); Ririz Setiawati Kusuma; 090810301007; 2013; 70 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Reformasi pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Jember merupakan salah satu kota yang pada akhirnya akan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna informasi keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di pemerintahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pemda kabupaten Jember dalam menerapkan SAP berbasis akrual yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi serta untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010 dan bagaimana model strategis akselerasi implementasi PP No 71 Tahun 2010.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Jember. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD di Kabupaten Jember dan sampelnya adalah pegawai bagian akuntansi pada SKPD di Kabupaten Jember. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas) dan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember cukup siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Masih ada beberapa kendala terkait dengan implementasi PP No 71 Tahun 2010 seperti : penyusunan LKPD

masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas dan kualitas masih belum cukup, kurangnya Bintel atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi. Sehingga model strategis akselerasi implementasi PP No 71 Tahun 2010 antara lain : dengan mengembangkan SAP berbasis akrual sesuai dengan kebutuhan, menyusun buletin teknis SAP berbasis akrual, mengembangkan SDM di bidang akuntansi pemerintahan.

PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas segala rahmat, petunjuk dan ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)”.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran, maupun kritik yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati serta penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. M Fathorrazi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak selaku Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Hendrawan Santoso Putra, SE, M.Si , Ak, selaku Dosen Pembimbing I dan Andriana, SE, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Kartika, S.E, M.Sc, Ak selaku penguji dan dosen wali selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Drs H. Djoko Supatmoko, Ak dan Wahyu Agus Winarno, S.E, M.Sc, Ak selaku dosen penguji;
6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya selama penulis berada di Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
7. Mama dan papa saya tercinta, Ibunda Afiati dan Ayahanda Iksan Nirwana Kusuma atas doa, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanannya yang tiada terhingga dan tidak dapat saya ungkapkan;
8. Adikku tersayang, Fitria Dwi Kusuma dan Firmansyah Rizki Kusuma yang selalu mendoakan,mendukung dan memberi motivasi;

9. Mbah Ibu dan Mbah Rama atas perhatian dan doanya;
10. Pakdeku, almarhum Aunur Rofiq, terima kasih atas dorongan dan motivasinya;
11. Sahabat-sahabat yang selalu ada buat aku, Salsabila family '06 - '13 (terutama angkatan '09), adik sekamarku Devi, guru dan sahabat SMA, SMP ku dan semua teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2009;
12. Kakak teristimewa yang selalu membantu;
13. Keluarga dan kerabat dekat;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan hasil penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulisan karya ilmiah yang sejenis di masa mendatang.

Jember, 25 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Teoretis	6
2.1.1 Pemerintahan Daerah	6
2.1.2 Akuntansi Pemerintahan	6
2.1.3 Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintahan Daerah	7
2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	9

2.1.5 Basis Akuntansi Pemerintahan	12
2.1.6 Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas	16
2.1.7 Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrua.....	18
2.1.8 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua (PP No. 24 tahun 2005)	19
2.1.9 Komponen Laporan Keuangan menurut PP No. 24 tahun 2005	22
2.1.10 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PP No. 71 tahun 2010)	24
2.1.11 Komponen Laporan Keuangan dalam PP No. 71 tahun 2010	25
2.1.12 Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010)	28
2.1.13 Komitmen	30
2.1.14 Sumber Daya Manusia.....	32
2.1.15 Infrastruktur	33
2.1.16 Sistem Informasi	34
2.2 Kajian Empiris	37
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Objek Penelitian.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.5 Sumber Informasi	41
3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian	41
3.7 Skala Pengukuran.....	43
3.8 Metode Analisis Data	43
3.8.1 Uji Instrumen Data.....	43
3.8.2 Analisis Deskriptif Kualitatif	44

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	46
4.2 Hasil Penelitian	49
4.2.1 Deskripsi Kualitatif.....	49
4.2.2 Deskripsi Karakteristik Responden	49
4.2.3 Hasil Uji Instrumen Data	52
4.2.4 Hasil Analisis Data	54
4.2.5 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jember Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI	62
4.3 Pembahasan.....	64
BAB 5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Keterbatasan Penelitian	69
5.3. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbedaan Komponen Laporan PP 24/2005 dengan PP 71/2010	25
2.2 Strategi Penerapan SAP Berbasis AkruaI Secara Bertahap	29
4.1 Daftar Nama SKPD Kabupaten Jember	47
4.2 Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner.....	49
4.3 Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
4.4 Distribusi Responden Menurut Umur.....	50
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	51
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	52
4.7 Hasil Uji Validitas Data.....	52
4.8 Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	54
4.9 Hasil Penilaian Parameter Integritas.....	55
4.10 Parameter untuk Kesiapan SDM terhadap Pelaksanaan SAP.....	57
4.11 Parameter Kesiapan Sarana Prasarana terhadap Pelaksanaan SAP.....	60
4.12 Parameter Kesiapan Sistem Informasi terhadap Pelaksanaan SAP.....	61
4.13 Rencana Strategis Pelaksanaan SAP Tahun 2013-2014.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Kuisisioner
- Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Data
- Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas Data
- Lampiran 5 Hasil Analisis Frekuensi
- Lampiran 6 Hasil Wawancara

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP

Berbasis Akruar. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Beberapa Negara yang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual memiliki kendala-kendala atau hambatan pada awal penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Di Negara Malaysia misalnya, seperti di banyak Negara berkembang, terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf akuntansinya. Insentif ini meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk mengikuti kursus yang mengarah pada kualifikasi akuntansi profesional (Saleh and Pendlebury, 2006). Berbeda dengan Negara Malaysia, di Negara Estonia telah ada kualifikasi pelatihan untuk para akuntan. Selain itu staf dari kementerian, auditor, pemerintah dan anggota parlemen membutuhkan pelatihan di bidang akuntansi keuangan (Juta Tikk, 2010). Pada pulau Fiji ada terlalu banyak ketergantungan pada konsultan internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. Rendahnya keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Geoffrey Tickell, 2010).

Ada beberapa penelitian tentang implementasi akuntansi berbasis akrual. Salah satunya, penelitian tentang penggunaan akuntansi berbasis akrual telah dilakukan oleh Saleh and Pendlebury (2006). Dari hasil survei kuesioner oleh akuntan pemerintah di Malaysia ditemukan bahwa prinsip-prinsip akuntansi akrual diperkenalkan terutama untuk akuntansi manajerial dan pengawasan. Malaysia juga memfokuskan pada inisiatif akuntansi manajemen untuk pengembangan akuntansi pemerintahan dan sekarang mempertimbangkan penggunaan akuntansi akrual dalam upaya untuk meningkatkan prosedur keuangan manajemen.

Jember merupakan salah satu kota yang pada akhirnya akan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses

penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna informasi keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di pemerintahan.

Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran), diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Jember harus menerapkan SAP pada masing-masing SKPD yang ada. Terlebih dengan adanya pengembangan sistem akuntansi dan pengembangan SDM dalam strategi penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap yang menyebabkan perlunya penyesuaian kembali baik sehingga hal itu menarik penulis untuk mengidentifikasi kesiapan Pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

1.2. Rumusan Masalah

Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Namun sejauh ini masih banyak terdapat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/Laporan Keuangan Pemerintah hasil pemeriksaan BPK, memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian bahkan *Disclaimer* (menolak memberikan pendapat). Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terkait dengan pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010, sejauh manakah kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi laporan keuangan SAP berbasis akrual, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kesiapan Pemda Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi?
- b. Apakah yang menjadi kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
- c. Bagaimanakah model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kesiapan Pemda Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi
- b. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- c. Untuk mengetahui model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini,antara lain:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan,wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan.

b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai analisa kesiapan sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan SAP berbasis aktual.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintahan yang akan menggunakan SAP berbasis aktual.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintahan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) Pemerintah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan.

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara. Di samping itu, termasuk kesesuaiannya yang berlaku.(Noerdiawan,2007).

2.1.3 Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintahan Daerah

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Menurut Abdul Halim (2004) dalam Hafiz Tanjung (2012) pada sistem pencatatan ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Hasil dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan tentang aset tetap yang dimiliki dan ekuitas. Sehingga selama itu pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan guna menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas. Menurut Indra Bastian (2006), basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aset dan kewajiban.

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 khususnya pada pasal 30,31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa akuntansi keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk menyusun standar

akuntansi pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Sesudah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tersebut ditetapkan, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 184 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan dilanjutkan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pada pasal 81 mengatur laporan keuangan Pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Sedangkan untuk pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara juga telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Guna membentuk KSAP telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2005.

Setelah kurang lebih lima tahun berlalu, pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

Pada Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual ini, beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami adalah:

- a. Laporan keuangan pokok yang disusun pada Standar Akuntansi Pemerintahan lama (PP No 24 tahun 2005) terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran
 - 2) Neraca
 - 3) Laporan Arus Kas, dan
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan pada SAP baru (PP No 71 tahun 2010) komponen laporan keuangan terdiri dari :

- 1) Laporan realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

b. Hubungan antar laporan keuangan terbagi atas laporan:

- 1) Laporan finansial

LO → LPE → Neraca

- 2) Laporan pelaksanaan anggaran

LRA → Laporan Perubahan SAL

- c. Basis pencatatan yang digunakan pada standar akuntansi pemerintah lama yaitu basis kas menuju akrual. Sedangkan pada SAP baru, basis yang digunakan yaitu basis akrual.
- d. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan neraca dan laporan operasional menggunakan basis akrual. (Hafiz Tanjung,2012).

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI no 24 tahun 2005).

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun

pemerintahan daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah Komite SAP.

Komite SAP bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. KSAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan SAP.

Komite SAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP, dan dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentuk kelompok kerja. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite SAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. Komite SAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Dengan demikian, Komite SAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standart tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, SAP telah disusun dengan berorientasi pada IPSAS. Selain itu dalam penyusunannya, SAP juga telah diharmoniskan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

Dalam menyusun SAP, Komite SAP menggunakan materi yang diterbitkan oleh:

- a. *International Federation of Accountant*
- b. *International Accounting Standards Committee*
- c. *International Monetary Fund*
- d. IAI
- e. *Financial Accounting Standards Board*

f. *Governmental Accounting Standards Board*

- g. Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku di Republik Indonesia
- h. Organisasi profesional lainnya di berbagai Negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.

Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat internasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu, strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Saat ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berbasis kas, sementara aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berbasis akrual.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Berikut adalah proses penyusunan SAP:

- a. Identifikasi topik.
- b. Konsultasi topik kepada komite pengarah.
- c. Pembentukan kelompok kerja.
- d. Riset terbatas oleh kelompok kerja
- e. Draf awal dari kelompok kerja.
- f. Pembahasan draf awal oleh komite kerja.
- g. Pengambilan keputusan oleh komite kerja.
- h. Pelaporan kepada komite pengarah dan persiapan atas draf publikasian
- i. Peluncuran draf publikasian.
- j. Dengar pendapat publik dan dengar pendapat terbatas.

- k. Pembahasan tanggapan dan masukan atas draf publikasian dari dengar pendapat.
- l. Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- m. Pembahasan tanggapan BPK.
- n. Finalisasi standar.
- o. Pemberlakuan standar.
- p. Sosialisasi awal standar.

SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan, yaitu:

- a. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP 03 : Laporan Aliran Kas
- d. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan
- e. PSAP 05 : Akuntansi persediaan
- f. PSAP 06 : Akuntansi Investasi
- g. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
- h. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- i. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan
- k. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian (Noerdiawan,2007).

2.1.5 Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan (Mustofa,2008). Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

a. Basis Akuntansi Kas (*Cash Basis of Accounting*)

Menurut Kieso dkk (2008) basis akuntansi kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Akuntansi berbasis kas ini tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, laporan posisi keuangann (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pencatatan secara *double entry*, tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja (Mustofa,2008).

b. Basis Akuntansi Akrual (*Accrual Basis of Accounting*)

Menurut Kieso dkk (2008) basis akuntansi akrual (*accrual basis of accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Heather Thompson dalam Bambang Widjajerso (2008) menyampaikan beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dalam sektor publik.
- 2) Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor publik.
- 3) Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
- 4) Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk mengambil keputusan.
- 5) Untuk mereformasi sistem anggaran belanja.
- 6) Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan. Ringkasnya, ketika para manajer diberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan, mereka berkepentingan untuk menyediakan informasi yang akurat seperti itu. Hanya dengan basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Manfaat-manfaat penerapan basis akrual menurut H Thompson dalam Bambang Widjajerso (2008), akan mencakup hal-hal seperti:

- a. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
- b. Menunjukkan bagaimana aktifitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
- c. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah.
- d. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.
- e. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.

Lebih lanjut, di dalam *study* no 14 yang diterbitkan oleh IFAC- *Public Sector Committee* (2003) dalam Budi Mulyana, manfaat penggunaan basis akrual dapat diuraikan berikut ini. Laporan keuangan yang disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk:

- a. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas.
- b. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, dan
- c. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Pada level yang lebih detil, pelaporan dengan basis akrual:

- a. Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya.
- b. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmennya.
- c. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.
- d. Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, dan
- e. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
- b. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
- c. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

2.1.6 Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas

Menurut Syukriy (2008) basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu (*specific period*) misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan tambahan atas item-item tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi akrual. Pengungkapan tersebut sangat beragam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas item-item yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo *near-cash* yang diperlihatkan dengan piutang-piutang yang akan diterima dan utang-utang yang akan dibayar selama periode tertentu dan aset finansial and kewajiban. Sebagai contoh Pemerintah Malaysia menggunakan *specified period* dalam laporan keuangan tahunan, yang

mengungkapkan beberapa catatan (*memo*) mengenai : aktiva, investasi, kewajiban, utang pemerintah (*public debt*), jaminan (*guarantees*), dan nota pembayaran.

Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan sekarang (*current financial resources*) dan perubahan-perubahan atas sumber-sumber keuangan tersebut. Basis akuntansi ini mempunyai fokus pengukuran yang lebih luas dari basis kas, pengakuan penerimaan dan pembayaran kas tertentu selama periode spesifik berarti bahwa terdapat informasi mengenai piutang dan hutang, meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.
- b. Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu adalah bahwa penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidak seragam untuk semua negara. Beberapa pemerintah menganggap bahwa seluruh penerimaan yang diterima selama periode tertentu adalah berasal dari periode sebelumnya, sedangkan pemerintah yang lain mengakui hanya beberapa dari penerimaan tersebut.
- c. Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara beberapa pemerintah, namun ada beberapa ketentuan, yaitu:
 - 1) Periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun;
 - 2) Periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran kas;
 - 3) Kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran kas selama periode tertentu harus diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pembayaran;
 - 4) Satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang secara kredit umumnya diselesaikan dalam periode tersebut, periode tertentu yang terlalu lama mungkin mengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan;
 - 5) Kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh (*fully disclosed*).

2.1.7 Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrua

Menurut Syukriy (2008) Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasi (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam paktek sebagai berikut ini:

- a. Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (*expense*) pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut;
- b. Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas;
- c. Pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek;
- d. Pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.

Beberapa penyusun standar telah mengidentifikasi kriteria atas waktu pengakuan pendapatan dengan akuntansi berbasis akrual, sebagai contoh Pemerintah Kanada mengakui pendapatan dalam periode di mana transaksi atau peristiwa telah terjadi ketika pendapatan tersebut dapat diukur (*measurable*). Pemerintah Federal Amerika Serikat mengakui pendapatan pajak dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut menjadi *susceptible to accrual* (yaitu ketika pendapatan menjadi *measurable* dan *available* untuk mendanai pengeluaran). *Available* berarti dapat ditagih dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi.

2.1.8 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akruwal (PP No. 24 tahun 2005)

Kieso dkk (2008) mengemukakan definisi dasar kas yang telah dimodifikasi (*modified cash basis*) adalah campuran antara dasar kas dengan dasar akruwal. Dalam standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan PP No 24 tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan pemerintah menggunakan basis modifikasi kas menuju akruwal (*cash toward accrual*). Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP 24/2005, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akruwal untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akruwal untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, diikuti oleh era reformasi tahun 1998, pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sering disebut-sebut sebagai pemicu dari reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan. Mahmudi dalam Bastian (2006) menyebutkan bahwa perjalanan manajemen keuangan Negara/Daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase yaitu: 1) era sebelum otonomi daerah, 2) era transisi otonomi (reformasi tahap 1) dan 3) era pascatransisi (reformasi tahap 2).

Lebih spesifik, Simanjuntak (2012) menyebutkan beberapa faktor penting yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah :

- a. Ditetapkannya tiga paket UU yang mengatur Keuangan Negara Pasal 32 (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan

keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- b. Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184 ayat (1) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Profesi Akuntansi. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah lama menginginkan adanya standar akuntansi di sektor publik sebagai hal yang paralel dengan telah adanya lebih dahulu standar akuntansi di sektor komersil.
- d. Birokrasi. Pemerintahan merupakan penyusun sekaligus pemakai yang sangat berkepentingan akan adanya suatu akuntansi pemerintahan yang handal. Dengan diundangkannya tiga paket keuangan Negara maupun undang-undang yang terkait dengan pemerintahan daerah mendorong instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk secara serius menyiapkan sumber daya dalam pengembangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- e. Masyarakat (LSM dan wakil rakyat). Masyarakat melalui LSM dan wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD juga menaruh perhatian terhadap praktik *good governance* pada pemerintahan di Indonesia.
- f. Sektor Swasta. Perhatian dari sektor swasta mungkin tidak terlalu signifikan karena akuntansi pemerintahan tidak terlalu berdampak secara langsung atas kegiatan dari sektor swasta. Namun, penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis akuntansi akan mendorong sebagian pelaku bisnis di sektor swasta untuk ikut menekuninya.
- g. Akademisi. Akademisi terutama di sektor akuntansi menaruh perhatian yang cukup besar. Atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan. Perhatian ini sangat erat kaitanya dengan penyiapan SDM yang menguasai kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan.

- h. Dunia Internasional (*lender dan investor*). World Bank, ADB, dan JBIC, merupakan lembaga internasional (*lender*), yang ikut berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik yang baik di Indonesia. Perkembangan akuntansi tadi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari proyek pembangunan yang didanai oleh lembaga tersebut.
- i. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). UU No. 17 tahun 2003 UU No. 15 tahun 2004 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD diperiksa oleh BPK. Untuk dapat memberikan opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum.
- j. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan. APIP yang meliputi Bawasda, Irjen, dan BPKP merupakan auditor intern pemerintah yang berperan untuk membantu pimpinan untuk terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah sekaligus mencegah praktik-praktik KKN. Akuntansi pemerintahan sangat erat kaitan dan dampaknya terhadap sistem pengendalian intern sehingga auditor intern mau tidak mau harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan sehingga dapat berperan untuk mendorong penerapan akuntansi pemerintahan yang sedang dikembangkan.

Setelah paket perundangan keuangan Negara diundangkan, langkah panjang reformasi masih terus bergulir untuk tahap penerapan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mewajibkan laporan keuangan tahun anggaran 2005 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara garis besar terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan atas laporan Keuangan, yang dikenal sebagai basis kas menuju akrual.

2.1.9 Komponen Laporan Keuangan menurut PP No. 24 tahun 2005

PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan sampai saat ini. Basis akuntansi yang digunakan dalam SAP ini adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), dimana penggunaan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Komponen-komponen laporan keuangan dalam SAP (PP No. 24 tahun 2005) adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/defisit
- 5) Pembiayaan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak

- 4) Persediaan
- 5) Investasi jangka panjang
- 6) Aset tetap
- 7) Kewajiban jangka pendek
- 8) Kewajiban jangka panjang
- 9) Ekuitas dana

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Daftar dan skedul.

2.1.10 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PP No. 71 tahun 2010)

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury,2003) dalam Mardiasmo (2006). Disamping itu, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Karena hal-hal tersebutlah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (KSAP,2006).

Widjarso (2008) menjelaskan alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
- b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
- c. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

2.1.11 Komponen Laporan Keuangan dalam PP No. 71 tahun 2010

Perbedaan komponen laporan keuangan antara PP 24/2005 dengan PP 71/2010 tampak pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan Komponen Laporan PP 24/2005 dengan PP 71/2010

PP 24/2005	PP 71/2010
<p>Komponen Laporan Keuangan Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan <p>Laporan yang bersifat optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan Kinerja Keuangan (LKK) ✓ Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 	<p>Komponen Laporan Keuangan Pokok :</p> <p>A. Laporan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) <p>B. Laporan Finansial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) <p>C. Catatan atas Laporan Keuangan</p>

Sumber : PP No. 71 tahun 2010

Laporan keuangan pemerintah yang berbeda dengan PP 24/2005 :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- 1) Saldo anggaran lebih awal
- 2) Penggunaan saldo anggaran lebih
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- 5) Saldo anggaran lebih akhir

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui

pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya oleh entitas pelaporan.

3) Surplus/defisit dari operasi

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.

4) Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

5) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa

6) Pos luar biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.

2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.

3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

7) Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir

2.1.12 Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010)

Strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus (*big bang*) dimana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan di seluruh kementerian/lembaga.
- b. Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan segala perangkat yang

dibutuhkan oleh setiap kementerian/lembaga pada saat semua kementerian atau lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan di semua kementerian/lembaga pada tahun 2015.

Tabel 2.2 Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual secara Bertahap

2010	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual b. Mengembangkan <i>Framework</i> Akuntansi Berbasis Akrual c. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual
2011	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail <i>requirement</i>) c. Pengembangan kapasitas SDM
2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	<ul style="list-style-type: none"> a. Ploting beberapa KL dan BUN b. <i>Review</i>, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Pararel Run</i> dan Konsolidasi seluruh LK b. <i>Review</i>, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber: KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Jakarta, 14 Desember 2010

2.1.13 Komitmen

Menurut Robbins (2002:15), komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Sedangkan Steers dan Porter dalam Supriyono (2006:24) berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi dimana karyawan sangat tertarik terhadap tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasi. Selanjutnya, Greenberg dan Baron (1997:190), komitmen organisasi menggambarkan seberapa jauh seseorang mengidentifikasi dan melibatkan dirinya pada organisasinya dan keinginan untuk tetap tinggal di organisasi itu. Porter *et.al.* dalam Miner, (1992:124) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Sikap ini dapat ditandai dengan empat hal, yaitu indikatornya diantaranya:

- a. Kepercayaan karyawan terhadap organisasi
- b. Partisipasi karyawan dalam aktivitas kerja
- c. Loyalitas terhadap organisasi
- d. Adanya Perasaan menjadi bagian dari organisasi

Sedangkan menurut Robbins dalam Sjabadhyni dkk (2001:456) memandang komitmen organisasi merupakan salah satu sikap kerja, karena ia merefleksikan perasaan seseorang (suka atau tidak suka) terhadap organisasi tempat ia bekerja. Hal ini didefinisikan sebagai suatu orientasi individu terhadap organisasi yang mencakup loyalitas, identifikasi, dan keterlibatan. Jadi komitmen organisasi merupakan orientasi hubungan aktif antara individu dan organisasi. Orientasi hubungan tersebut mengakibatkan individu atas kehendak sendiri bersedia memberikan sesuatu dan sesuatu yang diberikan itu menggambarkan dukungannya bagi tercapainya tujuan organisasi.

Komitmen organisasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Komitmen organisasi menurut Allen dan Meyer dalam Sjabadhyni dkk, (2001:457). Komitmen organisasi menurut Allen dan Meyer dibedakan atas tiga komponen, yaitu:
 - 1) Komponen afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi, dan keterlibatan karyawan di dalam suatu organisasi.
 - 2) Komponen normatif merupakan perasaan-perasaan karyawan tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi.
 - 3) Komponen *continuance* berarti komponen berdasarkan persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi.
- b. Komitmen organisasi menurut Porter *et.al.* dalam Miner (1992:128). Komitmen organisasi dari Porter lebih dikenal sebagai pendekatan sikap terhadap organisasi. Komitmen organisasi ini memiliki dua komponen, yaitu sikap dan kehendak untuk bertingkah laku.
 - 1) Komponen sikap mencakup beberapa hal diantaranya:
 - a) Identifikasi dengan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi, dimana penerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi. Identifikasi karyawan tampak melalui sikap dengan menyetujui kebijaksanaan organisasi, kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi, rasa kebanggaan menjadi bagian dari organisasi.
 - b) Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab pekerjaan di organisasi tersebut. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menerima hampir semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya.
 - c) Kehangatan, afeksi, dan loyalitas terhadap organisasi merupakan evaluasi terhadap komitmen, serta adanya ikatan emosional dan keterikatan antara organisasi dengan karyawan. Karyawan dengan komitmen tinggi merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi.

2) Komponen kehendak untuk bertingkah laku, diantaranya:

a) Kesiediaan untuk menampilkan usaha

Hal itu tampak melalui kesiediaan bekerja melebihi apa yang diharapkan agar organisasi dapat berkembang dan maju. Karyawan dengan komitmen tinggi, ikut memperhatikan nasib organisasi.

b) Keinginan tetap berada dalam organisasi

Pada karyawan yang memiliki komitmen tinggi, hanya sedikit alasan untuk keluar dari organisasi dan berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi yang dipilihnya dalam waktu lama.

2.1.14 Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2000: 3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Nawawi (2003:37) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lainnya. Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Hasibuan (2002:12) membagi komponen SDM menjadi pengusaha, yaitu setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Karyawan, ialah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang besarnya telah ditetapkan

terlebih dahulu (sesuai perjanjian). Posisi karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi :

Karyawan Operasional, ialah setiap orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan. Karyawan manajerial, ialah setiap orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah. Pemimpin, ialah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Hasibuan (2000:1), pengelolaan sumber daya manusia berarti penyiapan dan pelaksanaan suatu rencana yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

2.1.15 Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 2000).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000).

Hubungan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan alam (Grigg, 1988). Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memeberikan pelayanan publik yang penting (Kodoatie, 2003).

2.1.16 Sistem Informasi

Sistem berasal dari bahasa latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*Sustema*). Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat (www.wikipedia.org). Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan (www.wikipedia.org).

Menurut Mukhtar (2002 : 2), sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah *computer based system*, yang dapat diartikan integrasinya peralatan, program, data, dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer. Kesuksesan suatu sistem membutuhkan tujuan-tujuan yang terdefiniskan. Suatu sistem dengan tujuan tertentu akan menyelesaikan lebih banyak untuk suatu organisasi, daripada sistem tanpa tujuan, sedikit tujuan, atau tujuan yang ambisius.

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu (Jogiyanto, 2001) yaitu:

a. Komponen sistem

Sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

b. Batas sistem

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

c. Lingkungan luar sistem

Lingkungan luar dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

d. Penghubung sistem

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya.

e. Masukan dan keluaran sistem

Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Sedangkan keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dari sisa pembuangan.

f. Pengolah sistem

Pengolah sistem mengelola masukan menjadi keluaran.

g. Sasaran sistem

Suatu sistem akan dikatakan berhasil jika mengenai sasaran atau tujuannya.

Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat (Bodnar dan Hopwood, 1996: 1). Sementara menurut (www.wikipedia.org), informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian/penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan (*knowledge*) bagi penggunanya. Informasi memiliki nilai ekonomis jika ia dapat membantu dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya, jadi membantu sistem untuk mencapai tujuannya. Tujuan sistem informasi dan kebutuhan informasi yang didefinisikan secara jelas adalah salah satu kunci untuk suksesnya sistem informasi.

Calliueot dan Lapayre (dalam Handayani, 2007) menyatakan bahwa penciptaan suatu informasi yang efektif membutuhkan suatu pengorganisasian untuk mengembangkan sejumlah sistem-sistem pendukung. Penarikan staf yang kompeten dan layak adalah suatu tindakan yang sangat penting. Investasi yang besar dalam perangkat keras, perangkat lunak dan pendukung sistem yang lain adalah sesuatu yang penting, namun tanpa manusia bersumber daya yang kompeten untuk mengkoordinasikan sistem akan menghasilkan informasi yang tidak layak, tidak tepat waktu atau tidak akurat. Sumber informasi adalah data dimana data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal data item. Kualitas suatu informasi tergantung dari beberapa hal yaitu (Mukhtar, 2002: 4):

a. Akurat

Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.

b. Tepat waktu

Ini berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Jika pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi.

c. Relevan

Relevan berarti informasi tersebut harus mempunyai manfaat untuk pemakainya.

d. Lengkap

Informasi yang disajikan termasuk di dalamnya semua data-data yang relevan dan tidak mengabaikan kepentingan yang diharapkan oleh pembuat keputusan.

e. Dapat dimengerti

Informasi yang disajikan hendaknya dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pembuat keputusan. Nilai dari informasi ditentukan oleh dua hal yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya.

Formulasi pendapat ini:

$$\text{Nilai Informasi} = \text{Manfaat} - \text{Biaya}$$

Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol dan melaporkan informasi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Mukhtar (2002), suatu sistem informasi dapat dibagi menurut keberadaannya di suatu perusahaan. Ada sistem informasi informal dan sistem informasi formal. Sistem informasi informal keberadaannya di suatu organisasi tidak diakui secara resmi dan informasi yang dihasilkan seringkali mendukung informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi formal. Sedangkan sistem informasi formal secara eksplisit diakui keberadaannya di perusahaan dan bertanggung jawab untuk menghasilkan informasi.

Selain itu sistem informasi juga dibagi berdasarkan proses yang dijalankan untuk mendapatkan informasi, yaitu sistem informasi manual semua proses untuk memproduksi informasi tidak menggunakan mesin atau komputer, maka sistem informasi otomatis melibatkan mesin atau komputer dalam memproduksi informasi.

Sistem informasi mempunyai komponen yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Tujuan sistem informasi (Jogiyanto, 2001):

- a. Sistem informasi bisa meningkatkan produk dan jasa.
- b. Sistem informasi bisa meningkatkan efisiensi.
- c. Sistem informasi bisa meningkatkan proses kerja manajemen.

2.2 Kajian Empiris

Ada beberapa penelitian tentang penerapan SAP dalam pemerintahan. Nugraheni dan Subaweh (2008) meneliti dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dengan uji korelasi *Product Moment Pearson*, uji realibilitas dengan Cronbach's Alpha, uji normalitas dan homogenitas, uji hipotesis dengan uji regresi, analisis koefisien penentu dan uji t. Hasil menunjukkan, tanpa penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka konstanta peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebesar 42.650. Setiap penambahan satu satuan penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0.385 satuan, 0.252 satuan, dan 0.399 satuan secara berturut-turut. Artinya pengaruh penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan

pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada tingkat sedang.

Tim penelitian Kemendagri (2012) meneliti tentang kesiapan pemerintah dari pelaksanaan SAP yang dilakukan pada Provinsi DIY, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara dengan masing-masing 1 kabupaten atau kota dalam provinsi yang bersangkutan. Bahwa Pemda pada prinsipnya siap dan berkomitmen dalam menerapkan SAP berbasis akrual, ini ditunjukkan dengan kondisi-kondisi strategis seperti komitmen pemerintah, regulasi kebijakan, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta sistem informasi. Sementara itu, kendala yang dihadapi antara lain pengetahuan SDM dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya pelatihan/ bimbingan teknis (bintek). Pemda kurang memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP serta belum cukup didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di tingkat pemerintah provinsi hingga kota/kabupaten. Strategi dasar yang dapat dipergunakan untuk kesiapan penerapan SAP berbasis akrual penuh termasuk dalam kategori strategi agresif, yaitu dengan mengandalkan SDM yang memahami regulasi di bidang keuangan daerah dan akuntansi.

BAB 3.METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dekriptif kualitatif dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Di satu sisi kajian ini berupaya mendeskripsikan suatu fenomena secara apa adanya dari prespektif pelakunya, sedang dari sisi pendeskripsian itu dilakukan dengan bantuan alat-alat analisis kuantitatif. Dengan demikian diharapkan fenomena tentang kesiapan Pemda dalam implementasi SAP, kendala-kendala yang dihadapi di daerah dapat dideskripsikan secara gamblang untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan

Menurut Bungin (2008), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu. Surakhmad, 1994 dalam Yanti, 2012 menyebutkan penelitian deskriptif mempunyai sifat-sifat tertentu, sebagai berikut:

- a. memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa yang akan sekarang (masalah-masalah aktual),
- b. data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis. Pelaksanaan penelitian-penelitian deskriptif ini tidak hanya terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, namun data yang diperoleh kemudian dipaparkan, dan peneliti melakukan interpretasi data untuk mendapatkan pemahaman yang memadai.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh dari survey responden. (Indriantoro 2009).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Survey Lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah kuisisioner dan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk mendalami informasi yang belum didapat pada studi kepustakaan sedangkan kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisisioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. (Supomo dan Indriantoro 2009). Adapun rancangan pertanyaan dalam wawancara tersebut akan dilampirkan.

3.5 Sumber Informasi

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dan memberikan kuisioner. Kuisioner diberikan kepada PPK-SKPD sedangkan wawancara diberikan kepada Kepala SKPD, PPKD, dan seksi akuntansi di SKPKD. Adapun SKPD yang dijadikan objek penelitian antara lain semua SKPD di Kabupaten Jember.

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian diukur dengan komitmen, sumber daya manusia, infrastruktur, sistem informasi yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Komitmen

Menurut Porter *et.al.* dalam Miner, (1992:124), komitmen adalah dukungan yang kuat dari pimpinan dan bawahan satuan kerja termasuk pimpinan SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

b. Sumber daya manusia

Menurut Hasibuan (2000:3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Resistensi terhadap perubahan. Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik. Konsepsi tentang Kebijakan komitmen Pemerintahterkait dengan SAP berbasis akrual.

c. Infrastruktur

Infrastruktur adalah pendukung utama penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang diukur dengan aset fisik yang penting dalam kelancaran penerapan SAP berbasis akrual (Grigg, 2000).

d. Sistem informasi

Menurut Mukhtar (2002: 4), sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang menyatakan "Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh". SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3.7 Skala Pengukuran

Skala adalah perangkat ukur yang digunakan untuk mengetahui intensitas, arah atau tingkat dalam sebuah variabel yang berada pada tingkat pengukuran ordinal. Penelitian ini menggunakan skala likert, yaitu pengukuran yang memungkinkan responden untuk merangking seberapa kuat mereka siap atau tidak siap terhadap pernyataan-pernyataan tertentu. Skala ini mempunyai jarak dari sangat positif ke sangat negatif terhadap obyek sikap tertentu. Skala likert juga diartikan sebagai cara pengukuran dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian kemendagri (2012) dimana skala pengukuran kuisisioner menggunakan skala:

- 1 = sangat tidak siap
- 2 = tidak siap
- 3 = cukup siap
- 4 = siap
- 5 = sangat siap

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data diperoleh dari penyebaran kuisisioner. Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antar masing-masing pertanyaan ataupun pernyataan dengan skor total pengamatan (Arikunto, 2006:202).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih (Umar 2003:176). Reliabilitas dapat dikatakan menunjukkan kekonsistenan dari suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Makin kecil kesalahan

pengukuran makin *reliabel* alat pengukur begitu pula sebaliknya. Pengujian keandalan alat pengukuran dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas menggunakan metode alpha (). Metode alpha yang digunakan adalah metode Cronbach. Menurut Yarnest (2003; 68) instrumen dapat dikatakan handal (*reliabel*) bila memiliki koefisien reliabilitas diatas 0,6.

Setelah menilai alpha, selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reliabilitas. Instrumen yang dipakai dalam variabel diketahui handal (*reliabel*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2002:42).

3.8.2 Analisis Deskriptif Kualitatif

Teknik yang dipakai dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif menurut Indriantoro dan Supomo (2002:26), merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta saat ini dari suatu populasi.

Penelitian ini menggunakan deskripsi analisis. Metode analisis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai penelitian. Metode ini untuk memaparkan sesuatu dengan cara mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini terjadi. Metode analisis deskriptif sesuai dengan hakikatnya adalah data yang telah terkumpul kemudian diseleksi, dikelompokkan, dilakukan pengkajian, intepretasi dan disimpulkan. Selanjutnya hasil kesimpulan itu didesripsikan.

Adapun langkah-langkap analisis deskriptif antara lain:

a. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola Jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan hasil kuisisioner, peneliti melakukan pengelompokan atau distribusi tentang karakteristik responden seperti umur, jenis kelamin, pendidikan

dan jabatan. Selanjutnya juga dilakukan pengelompokan jawaban responden kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

b. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjejelasan. Berdasarkan hasil jawaban kuisisioner dan wawancara maka pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

c. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Akuntansi keuangan pemerintah Kabupaten Jember daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Struktur akuntansi di pemerintah daerah Kabupaten Jember menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat – Kantor Cabang (*Home Office – Branch Office Transaction* atau disingkat menjadi HOB0). Di Pemda Kabupaten Jember yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD (dalam hal ini adalah BPKAD – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (*reciprocal account*) yaitu akun Rekening Koran-Pusat (RK-Pusat) yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD (RK-SKPD) yang ada di PPKD.

Akuntansi RK-Pusat merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPD. Akun “RK-Pusat” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunaannya khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun “RK-

Pusat” akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemda), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda). Akun-akun RK-Pusat dan RK-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat penggabungan laporan keuangan di Pemda Kabupaten Jember oleh PPKD/BUD.

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki 40 SKPD seperti yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Daftar Nama SKPD Kabupaten Jember

No	SKPD	Pegawai akuntansi (Orang)
1	Bapemas Pemerintahan Kabupaten Jember	3
2	Bappekab dan PM Pemerintahan Kabupaten Jember	3
3	Bakesbangpol dan Linmas Pemerintahan Kabupaten Jember	2
4	Badan Kepegawaian Pemerintahan Kabupaten Jember	3
5	Badan Pemberdayaan Perempuan Pemerintahan Kabupaten Jember	4
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember	2
7	Badan Penanggulangan Bencana Pemerintahan Kabupaten Jember	3
8	Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Jember	3
9	Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Jember	3
10	Dinas Pertanian Pemerintahan Kabupaten Jember	2
11	Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintahan Kabupaten Jember	3
12	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pemerintahan Kabupaten Jember	4
13	DPU Bina Marga Pemerintahan Kabupaten Jember	2
14	DPU Cipta Karya Pemerintahan Kabupaten Jember	3
15	DPU Pengairan Pemerintahan Kabupaten Jember	3
16	Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintahan Kabupaten Jember	2
17	Disperindag dan ESDM Pemerintahan Kabupaten Jember	4
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintahan Kabupaten Jember	3
19	Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Jember	2

No	SKPD	Pegawai akuntansi (Orang)
20	Dinas Pendapatan Pemerintahan Kabupaten Jember	5
21	Dinas Kependudukan Pemerintahan Kabupaten Jember	4
22	Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Jember	4
23	Dinas Pasar Pemerintahan Kabupaten Jember	4
24	Kantor Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Jember	3
25	Kantor Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Jember	3
26	Kantor Pemuda dan Olahraga Pemerintahan Kabupaten Jember	3
27	Kantor Perpustakaan Pemerintahan Kabupaten Jember	3
28	Satpol PP Pemerintahan Kabupaten Jember	3
29	Bagian Pemerintahan Umum Pemerintahan Kabupaten Jember	1
30	Bagian Pemerintahan Desa Pemerintahan Kabupaten Jember	3
31	Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Jember	2
32	Bagian Humas Pemerintahan Kabupaten Jember	3
33	Bagian Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Jember	4
34	Bagian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Jember	4
35	Bagian Kesra Pemerintahan Kabupaten Jember	3
36	Bagian Organisasi Pemerintahan Kabupaten Jember	2
37	Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Jember	3
38	RSD Dr Soebandi Pemerintahan Kabupaten Jember	5
39	RSD Kalisat Pemerintahan Kabupaten Jember	3
40	RSD Balung Pemerintahan Kabupaten Jember	4

Sumber: Pemerintah Kabupaten Jember, Tahun 2013

Pemerintah Kabupaten Jember (dalam hal ini BPKAD sebagai SKPKD) melakukan pelaporan keuangan satu tahun sekali yang diterbitkan paling lambat tanggal 10 Januari. BPKAD membentuk tim laporan keuangan dari bidang akuntansi sebagai tim konsolidasi.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh bagian akuntansi/bagian umum dan keuangan/bagian sekretariat yang nantinya akan diserahkan kepada kepala SKPD sebagai penanggung jawab dari tiap SKPD. tetapi tiap bulan kepala SKPD menyerahkan laporan keuangan untuk di rekonsiliasi di BPKAD.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Kualitatif

Pada bab sebelumnya, penentuan besarnya sampel menggunakan sejumlah keseluruhan kuisisioner (40 buah) yang telah kami sebarkan pada masing-masing unit kerja dan telah mendapatkan balasannya.

Tabel 4.2 Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner

Kuesioner yang disebar	40	100 %
Kuesioner yang Kembali	32	80 %
Kuesioner valid/yang diolah	32	80 %
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	0	0 %

Sumber : Data diolah

Tabel 4.2 menunjukkan penyebaran dan tingkat pengembalian dengan jumlah kuisisioner yang disebar sebanyak 40 kuisisioner, yang kemudian dari jumlah 40 kuisisioner yang disebar, kembali sebanyak 32 kuisisioner atau 80%. Berdasarkan 80% kuisisioner yang kembali semuanya dianggap memenuhi syarat.

4.2.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pegawai bagian akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember maka dapat diketahui karakteristik responden di bawah ini.

a. Jenis kelamin

Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Orang	Persentase
1	Pria	10	31,2
2	Wanita	22	60,8
Jumlah		32	100

Sumber: Lampiran 3, diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin pegawai bagian akuntansi sebagian besar adalah wanita, dimana terdapat 22 orang atau 60,8% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan jenis kelamin pria terdapat 10 orang atau 31,2% dari jumlah keseluruhan responden. Hal itu menunjukkan bahwa bidang akuntansi pemerintahan kebanyakan di pegang oleh wanita karena ketelitian yang diperlukan dalam bidang ini.

b. Umur Pegawai bagian akuntansi

Karakteristik responden dilihat dari umur pegawai disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Distribusi Responden Menurut Umur

No.	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 25 tahun	3	9,4
2	25 – 35 tahun	20	62,5
3	>35 tahun	9	28,1
Jumlah		32	100

Sumber: Lampiran 3, diolah

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki umur 25– 35 tahun yakni sebesar 20 orang atau 62,5%. Hal ini menunjukkan umumnya pegawai bagian akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merupakan pegawai bagian akuntansi masih golongan muda tetapi sudah mampu dan berpengalaman dalam mengerjakan pekerjaan.

c. Lama Bekerja

Karakteristik pegawai bagian akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berdasarkan lama bekerja dibagi dalam tiga kategori antara lain <5 tahun, 5 sampai 10 tahun dan lebih dari 10 tahun. Karakteristik responden berdasarkan lama jabatan ditunjukkan Tabel 4.5

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Frekuensi	Orang	Persentase (%)
1	< 5 tahun	5	15,6
2	5-10 tahun	23	71,8
3	11-15 tahun	4	12,6
Jumlah		32	100

Sumber: Lampiran 3, diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mempunyai lama bekerja antara 5 tahun – 10 tahun , dimana terdapat 23 orang atau 71,8% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan yang memiliki lama bekerja 11-15 tahun terdapat 4 orang atau 12,6% dari jumlah keseluruhan responden dan responden yang memiliki lama bekerja < 5 tahun terdapat 5 orang atau 15,6% dari keseluruhan responden.

d. Tingkat pendidikan

Aspek pendidikan sangat penting bagi seorang pegawai bagian akuntansi, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif. Pada sisi yang lain, tingkat pendidikan pada masa sekarang ini menjadi salah satu persyaratan utama untuk dapat menduduki jabatan maupun untuk dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Pengelompokan responden berdasarkan pendidikan dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	
		Orang	Persentase
1	SMA	5	15,6
2	Diploma	10	31,2
3	Sarjana S-1	17	53,2
Jumlah		32	100

Sumber: Lampiran 3, diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pendidikan pegawai bagian akuntansi sebagian besar adalah sarjana, dimana terdapat 17 orang atau 53,2% dari jumlah keseluruhan responden. Pendidikan Diploma sebanyak 10 orang atau 31,2% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan pendidikan SMA sebanyak 5 orang atau 15,6%. Hal itu menunjukkan bahwa pegawai bagian akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagian besar berpendidikan sarjana sehingga memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang baik.

4.2.3 Hasil Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah *esens* kebenaran penelitian. Sebuah *instrument* dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur serta dapat mengungkapkan data dan variabel yang akan diteliti secara tepat. Kriteria validitas dalam penelitian ini dengan analisis faktor (*Confirmatory Factor Analysis*) yaitu dikatakan valid jika nilai $KMO > 0,5$ dan *Barlett's Test* dengan signifikansi $< 0,05$ (Ghozali, 2002). Hasil uji validitas dijelaskan pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Data

No	Variabel	Nilai KMO	<i>Loading Factor</i>	<i>Barlett's Test</i>	Keterangan
1	X1	0,682			
	X11		0,557	0,000	Valid
	X12		0,600	0,000	Valid
	X13		0,580	0,000	Valid
	X14		0,674	0,000	Valid
	X15		0,688	0,000	Valid
	X16	0,597	0,000	Valid	

	X17		0,514	0,000	Valid
	X18		0,801	0,000	Valid
	X19		0,774	0,000	Valid
	X110		0,579	0,000	Valid
	X11		0,608	0,000	Valid
2	X2				Valid
	X21		0,727	0,000	Valid
	X22		0,571	0,000	Valid
	X23		0,526	0,000	Valid
	X24		0,838	0,000	Valid
	X25		0,549	0,000	Valid
	X26	0,602	0,502	0,000	Valid
	X27		0,515	0,000	Valid
	X28		0,419	0,000	Valid
	X29		0,565	0,000	Valid
	X210		0,795	0,000	Valid
	X211		0,682	0,000	Valid
3	X3				
	X31		0,550	0,000	Valid
	X32		0,899	0,000	Valid
	X33	0,678	0,927	0,000	Valid
	X34		0,943	0,000	Valid
	X35		0,514	0,000	Valid
	X36		0,555	0,000	Valid
4	X4				Valid
	X41		0,567	0,000	Valid
	X42		0,520	0,000	Valid
	X43	0,655	0,827	0,000	Valid
	X44		0,877	0,000	Valid
	X45		0,881	0,000	Valid
	X46		0,575	0,000	Valid

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan hasil perhitungan nilai KMO menyatakan nilai KMO > 0,5 dan *Barlett's Test* < 0,05 (Ghozali, 2002:47). Sedangkan kriteria valid per indikator menunjukkan nilai loading factor > 0,5. Dengan demikian setiap item pertanyaan dalam kuisisioner memiliki konsistensi internal dan dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas dilakukan dengan cara mencari angka reliabilitas dari butir-butir pernyataan masing-masing variabel dalam kuisioner dengan menggunakan rumus *standardized item alpha*. Setelah diperoleh nilai α , selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reliabilitas lebih dari nilai kritis reliabilitas dapat ditentukan sebesar 0,60. sehingga dapat dikatakan *reliabel* jika nilai α lebih besar dari angka kritis reliabilitas. Nilai α yang dihasilkan merupakan nilai reliabilitas variabel penelitian. Hasil pengujian reliabilitas terhadap parameter komitmen (X1), SDM (X2), sarana prasarana (X3) dan sistem informasi (X4) ditunjukkan Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8. Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Nilai α	Reliabilitas	Keterangan
1	X1	0,60	0,818	Reliabel
2	X2	0,60	0,713	Reliabel
3	X3	0,60	0,692	Reliabel
4	X4	0,60	0,724	Reliabel

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa semua nilai α lebih besar dari angka kritis reliabilitas, sehingga semua pertanyaan dalam satu variabel dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya (Ghozali, 2002:52).

4.2.4 Hasil Analisis Data

Hasil penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dengan melihat indikator: komitmen/integritas, SDM, sarana prasarana, serta sistem informasi dijelaskan Tabel 4.9 sebagai berikut.

a. Parameter Integritas

Berdasarkan hasil distribusi responden penilaian kesiapan diukur dengan parameter integritas yang diukur dengan beberapa indikator dijelaskan Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Penilaian Parameter Integritas

No	Parameter Komitmen / Integritas meliputi indikator	Alternatif Jawaban				
		STTS	CS	S	SS	
1	Anda memiliki kesiapan komitmen utama untuk tugas dalam dengan baik hendaknya menjunjung azas, visi dan misi pemakaian SAP berbasis akrual	-	1	6	25	-
2	Anda memiliki kesiapan disiplin serta memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasnya untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan sistem akuntansi pemerintahan	-	-	7	21	4
3	Anda memiliki kesiapan dalam keberanian dalam bersikap, dalam melaksanakan tugas layanan publik dengan peningkatan melalui pendekatan SAP	-	1	5	21	5
4	Anda memiliki kesiapan dukungan dasar dalam pelaksanaan administrasi publik dengan memanfaatkan SAP dalam bentuk peraturan perundangan dan maupun peraturan pendukung lainnya	-	-	4	21	7
5	Pemerintah bertanggung jawab moral, terhadap rencana di aplikasikannya SAP dalam menunjang optimasi kinerja pemerintah	-	-	8	13	11
6	Pemerintah memiliki inovasi dan obyektif untuk memanfaatkan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan	-	-	3	20	9
7	Pemerintah untuk mempunyai sikap komitmen dan integritas pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah	-	-	7	18	7
8	Pemerintah untuk mempunyai prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah	-	1	14	11	6
9	Pemerintah daerah mempunyai/memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah	-	-	10	15	7
10	Pemerintah mempunyai strategi pendekatan yang humanis transparan, demokratis, dan akuntabel dalam pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah	-	-	12	15	5

11	Pemerintah mempunyai motivasi untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah	-	1	14	14	3
Total		0	4	90	194	64

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.9 tentang penilaian kesiapan SAP berdasarkan basis aktual dari parameter integritas yang diukur dengan sebelas indikator. Penilaian indikator komitmen utama dalam tugas dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 25 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang.

Penilaian indikator kesiapan kedisiplinan dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 21 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 4 orang.

Penilaian indikator kesiapan dalam keberanian bersikap dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 21 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang.

Penilaian indikator kesiapan dukungan dasar dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 21 orang dan paling sedikit menjawab cukup siap sebanyak 4 orang.

Penilaian indikator pertanggungjawaban moral terhadap pengaplikasian SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 13 orang dan paling sedikit menjawab cukup siap sebanyak 8 orang.

Penilaian indikator kepemilikan inovasi dalam memanfaatkan SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 20 orang dan paling sedikit menjawab cukup siap sebanyak 3 orang.

Penilaian indikator sikap komitmen dan integritas pembangunan SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 18 orang dan paling sedikit menjawab cukup siap dan sangat siap sebanyak 1 orang.

Penilaian indikator prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan pembangunan SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab cukup siap sebanyak 14 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang.

Penilaian indikator kemampuan mencapai hasil kerja dengan pembangunan SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 15 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 7 orang.

Penilaian indikator strategi pendekatan dalam pembangunan SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 15 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 5 orang.

Penilaian indikator pencapaian hasil kerja yang baik dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 14 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang. Dari hasil Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa kesiapan pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dilihat dari segi integritas adalah siap, dengan total 194 jawaban siap dari 11 indikator parameter integritas.

b. Kesiapan SDM

Kesiapan yang diukur dengan parameter kesiapan SDM pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Parameter untuk Kesiapan SDM terhadap Pelaksanaan SAP

No	Parameter Kesiapan SDM	Alternatif Jawaban				
		ST	TS	CS	S	SS
1	Pemerintah untuk memiliki integritas dalam pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah	-	2	11	13	6
2	Pemerintah memiliki rasa kepuasan dalam bidang tugas dengan pelaksanaan SAP mendukung optimasi kinerja pemerintahan khususnya bidang keuangan	-	5	17	10	-
3	Anda membutuhkan perhatian dan penghargaan (<i>Reward and punishment</i>) untuk menyelesaikan segala aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP	-	1	4	13	14

4	Pemerintah membutuhkan dukungan lingkungan kerja yang sesuai untuk menyelesaikan segala aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP	-	-	10	15	7
5	Pemerintah memiliki alasan serta harapan terhadap optimasi bidang tugas pemerintahan daerah dengan pelaksanaan SAP di bidang keuangan	-	1	6	10	15
6	Pemerintah memiliki / membutuhkan adanya dorongan dan kesempatan untuk berprestasi dari atasan untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah dengan menggunakan SAP di bidang keuangan	-	2	10	10	10
7	Pemerintah membutuhkan ruangan kerja, dan lingkungan nyaman baik khususnya untuk mampu meningkatkan optimasi bidang tugas pemerintahan daerah dengan pelaksanaan SAP di bidang keuangan	-	1	19	12	-
8	Pemerintah memiliki /kemauan untuk bekerja keras, disiplin dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah	-	3	19	10	-
9	Anda membutuhkan promosi atasan atas prestasi kerja yang diraih atas pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan	-	1	19	12	-
10	Anda memiliki loyalitas atas pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah	-	1	8	17	6
11	Anda memiliki kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah	-	3	7	20	2
Total		0	20	130	142	60

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.10 tentang penilaian kesiapan SAP berdasarkan basis aktual dari parameter kesiapan SDM yang diukur dengan sebelas indikator. Penilaian indikator integritas dalam pelaksanaan SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 13 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 2 orang. Penilaian indikator kepuasan dalam bidang tugas dengan penilaian responden terbesar menjawab cukup siap sebanyak 17 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 5 orang. Penilaian indikator *reward* dan *punishment* untuk optimalisasi

hasil kerja dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 13 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang. Penilaian indikator dukungan lingkungan kerja dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 15 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 7 orang. Penilaian indikator optimasi bidang tugas pemerintahan daerah dengan penilaian responden terbesar menjawab sangat siap sebanyak 15 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang.

Penilaian indikator dorongan untuk berprestasi dari atasan dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 10 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 2 orang. Penilaian indikator kebutuhan akan lingkungan yang baik dengan penilaian responden terbesar menjawab cukup siap sebanyak 19 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang. Penilaian indikator komitmen untuk bekerja keras dengan penilaian responden terbesar menjawab cukup siap sebanyak 19 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 3 orang. Penilaian indikator promosi atas prestasi kerja dengan penilaian responden terbesar menjawab cukup siap sebanyak 19 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang. Penilaian indikator loyalitas atas pelaksanaan SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 17 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang. Penilaian indikator kemampuan dalam melaksanakan SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 20 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 2 orang. Dari hasil Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa kesiapan pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dilihat dari segi SDM adalah siap, dengan total 142 jawaban siap dari 11 indikator parameter SDM.

c. Kesiapan Sarana Prasarana

Kesiapan yang diukur dengan parameter kesiapan sarana prasarana pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Parameter Kesiapan Sarana Prasarana terhadap Pelaksanaan SAP

No	Parameter Sarana Prasarana	Alternatif Jawaban				
		S	T	CS	S	SS
1	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan sarana ruangan yang memadai khususnya untuk operasi perangkat SAP	-	-	11	16	5
2	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana perangkat lunak yang memadai khususnya untuk operasi SAP	-	1	19	4	8
3	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi yg berkesinambungan khususnya untuk operasi SAP	-	-	12	12	8
4	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana administrasi yang memadai khususnya untuk operasi SAP	-	2	14	8	8
5	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran yang memadai khususnya untuk operasi SAP	-	-	6	21	5
6	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sumberdaya manusia berkualitas yang memadai khususnya untuk operasi SAP	-	-	3	24	5
Total		0	3	65	85	39

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.11 tentang penilaian kesiapan SAP berdasarkan basis aktual dari parameter kesiapan sarana dan prasarana yang diukur dengan enam indikator. Penilaian indikator kesiapan sarana ruangan yang memadai dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 16 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 5 orang. Penilaian indikator dukungan perangkat lunak yang memadai dengan penilaian responden terbesar menjawab cukup siap sebanyak 19 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang. Penilaian indikator kesiapan data pendukung operasional dengan penilaian responden

terbesar menjawab siap sebanyak 12 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 8 orang. Penilaian indikator kesiapan administrasi dengan penilaian responden terbesar menjawab cukup siap sebanyak 14 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 2 orang. Penilaian indikator kesiapan dukungan anggaran dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 21 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 5 orang. Penilaian indikator kesiapan dukungan SDM berkualitas dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 24 orang dan paling sedikit menjawab cukup siap sebanyak 3 orang. Dari hasil Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa kesiapan pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dilihat dari segi sarana prasarana adalah siap, dengan total 85 jawaban siap dari 6 indikator parameter sarana prasarana.

d. Kesiapan Sistem Informasi

Parameter kesiapan sistem informasi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.12 Parameter Kesiapan Sistem Informasi terhadap Pelaksanaan SAP

No	Parameter Sistem	Alternatif Jawaban				
		ST	TS	CS	S	SS
1	Pemerintah daerah mempunyai Platform pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana jangka menengah maupun jangka pendek dengan transparansi, akuntabilitas, dalam bidang keuangan, membutuhkan dukungan SAP	-	-	7	24	1
2	Pemerintah didukung oleh sistem mekanisme penyelenggaraan SAP <i>clear</i> dan <i>clean</i> dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam bidang keuangan	-	-	-	12	20
3	Pemerintah didukung oleh sistem Manajemen Informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di tingkat pemerintah provinsi sampai Kabupaten Jember	-	2	9	14	7
4	Pemerintah didukung oleh sistem dalam perangkat lunak SAP yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali	-	2	6	11	13
5	Pemerintah didukung oleh pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP	-	2	9	10	11

6	Pemerintah memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP	-	-	13	9	10
Total		0	6	44	80	62

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.12 tentang penilaian kesiapan SAP berdasarkan basis akrual dari parameter kesiapan sistem informasi yang diukur dengan enam indikator. Penilaian indikator kesiapan platform pelaksanaan kegiatan dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 24 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 1 orang. Penilaian indikator dukungan sistem mekanisme penyelenggaraan SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab sangat siap sebanyak 20 orang dan paling sedikit menjawab siap sebanyak 12 orang. Penilaian indikator dukungan sistem manajemen informasi dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 14 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 2 orang. Penilaian indikator dukungan perangkat lunak SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab sangat siap sebanyak 13 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 2 orang. Penilaian indikator dukungan pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP dengan penilaian responden terbesar menjawab sangat siap sebanyak 11 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 2 orang. Penilaian indikator pendampingan dalam operasionalisasi dengan penilaian responden terbesar menjawab cukup siap sebanyak 13 orang dan paling sedikit menjawab siap sebanyak 9 orang. Dari hasil Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa kesiapan pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dilihat dari segi sistem informasi adalah siap, dengan total 80 jawaban siap dari 6 indikator parameter sistem informasi.

4.2.5 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jember Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Pemerintah Kabupaten Jember menyadari sepenuhnya bahwa penerapan SAP dalam laporan keuangan di setiap kementerian/lembaga maupun daerah sangat berperan terhadap opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan karena dasar

BPK melakukan audit adalah SAP, sehingga penyusunan laporan keuangan selalu berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas. Meskipun Pemda Kabupaten Jember belum mengaplikasikan SAP berbasis akrual, tetapi dari prinsip dasar sistem tersebut ada beberapa keuntungan, diantaranya dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah, memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas seluruh penggunaan seluruh sumber daya baik aktiva/ kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan. Kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan PP No. 71 tahun 2010 adalah penyiapan SDM pengelola, perlu adanya sosialisasi, bintek dan pelatihan sebelum sistem itu dilaksanakan. Khusus terkait SDM sebagai pelaksana penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di daerah, kondisi SDM yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi masih terbatas. Perlu pemahaman mendasar untuk melaksanakan sistem SAP berbasis akrual tersebut sehingga perlu waktu dan pelatihan dalam implementasi pelaksanaannya karena SDM pengelola keuangan saat ini belum semuanya memahami sistem tersebut. SDM masih memerlukan diklat terkait SAP terutama yang menyangkut perubahan-perubahan peraturan sehingga segala kendala dalam pelaksanaan bisa di share kan juga dalam diklat tersebut.

PNS sebagai SDM sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tanggungjawabnya. *Punishment* dan *reward* sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi untuk lebih optimal dalam bekerja saat ini. *Reward* dan *punishment* diberikan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini, dalam mendukung kelancaran penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pemda telah menyiapkan sarana ruangan, sarana prasarana perangkat lunak serta sarana administrasi lainnya. Pada pemda sudah ada satu sistem/ perangkat lunak yang mendasarkan dan sistem yang digunakan yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).

Dalam pengimplementasian PP No. 71 tahun 2010, Pemda Kabupaten Jember sudah mempersiapkan sisdur dan kebijakan akuntansi berbasis akrual, peningkatan kualitas SDM. Saat ini kendala yang dihadapi adalah kualitas SDM yang memahami akuntansi berbasis akrual, sebagian besar SDM yang menangani pelaporan keuangan

(SKPD) berasal dari latar belakang pendidikan non akuntansi sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Saran/ pendapat Pemda terhadap amanat PP No. 71 Tahun 2010 adalah diperlukannya pedoman sebagai petunjuk teknis maupun pelaksanaan sebagai pendukung, sehingga memudahkan pemda untuk mengimplementasikan PP No. 71 tahun 2010. Khusus terkait SDM, kendalanya adalah latar belakang pendidikan yang kebanyakan bukan dari akuntansi sehingga menyebabkan pemahaman dan pengimplementasian PP No. 71 Tahun 2010 kurang maksimal. Selain itu kendalanya apabila ada petugas yang pindah dari SKPD semula, sehingga butuh waktu untuk SDM yang melanjutkan tugas untuk menyusun. SDM yang bertugas menyusun pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dianggap belum cukup untuk membantu kelancaran penyusunan pertanggungjawaban APBD, sebaiknya SKPD mempunyai SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Adapun rencana strategis dari pelaksanaan SAP Berbasis Akrual yang disusun berdasarkan wawancara dijelaskan Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13. Rencana Strategis Pelaksanaan SAP Tahun 2013-2014

Tahun 2013		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrual	Pengembangan SAP Berbasis Akrual sesuai dengan kebutuhan
2.	Penyusunan Buletin Teknis SAP	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akrual sesuai dengan kebutuhan
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/<i>Workshop</i> PP SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis. 2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i> 3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 4. Pemeliharaan Website KSAP 5. Penyelenggaraan <i>Help Desk</i> 6. Pelayanan Publik
Tahun 2014		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrual	Pengembangan SAP Berbasis Akrual sesuai dengan kebutuhan
2.	Penyusunan Buletin Teknis SAP	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akrual sesuai dengan kebutuhan

3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis AkruaI dan Buletin Teknis 2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i> 3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 4. Pemeliharaan Website KSAP 5. Penyelenggaraan <i>Help Desk</i> 6. Pelayanan Publik
----	---	---

4.3 Pembahasan

Penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember Jember dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dengan melihat indikator: komitmen/integritas, SDM, Sarana Prasarana, serta Sistem Informasi adalah Kabupaten Jember dikategorikan cukup siap untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini didasarkan pada penilaian kesiapan dari masing-masing parameter yang pada umumnya menyatakan siap dan cukup siap.

Pengukuran kesiapan dilihat dari parameter integritas dan komitmen secara keseluruhan pada umumnya menyatakan siap dari masing-masing indikator. Hal ini dijelaskan pada nilai tertinggi dari masing-masing indikator yang menyatakan siap menerima akuntansi pemerintah berbasis akruaI. Menurut hasil wawancara dengan Drs Kusni, M.M Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pendidikan pada tanggal 24 Juni 2013

“ Integritas dan komitmen itu penting dalam melaksanakan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya integritas dan komitmen menjadi landasan kuat untuk keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”

Penilaian kesiapan dari parameter sumber daya manusia yang ditekankan pada pegawai akuntansi yang akan melaksanakan menyatakan siap dalam menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dilandasi beberapa pengetahuan dan keahlian tentang akuntansi

yang akan mendukung keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Pentingnya sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan dijelaskan dengan hasil wawancara Kasubag Keuangan Dikenduk Ir Sri Handayani pada tanggal 26 Juni 2013 yang menyatakan bahwa :

“Sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual harus memperhatikan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan khususnya pegawai akuntansi yang akan mengerjakannya. Kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai akuntansi didukung dengan kesiapan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP nantinya”

Sedangkan kesiapan sarana prasarana serta sistem informasi dalam penerapan SAP juga tidak kalah pentingnya mengingat parameter kesiapan sarana dan sistem informasi berkaitan dengan pelaksanaannya penerapan SAP nantinya.

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesiapan dalam penerapan SAP, dalam rangka kesiapan implementasi SAP berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tersebut, masih terdapat beberapa kendala. Adanya kelemahan atau kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka kesiapan implementasi SAP berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, maka Kabupaten Jember perlu lebih fokus dan optimal dalam mengatasi kendala dimaksud. Dengan kata lain, adalah peningkatan komitmen, kemauan dan integritas pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian dan memberikan penghargaan (*Reward and punishment*) dan memberikan kesempatan untuk berprestasi serta memberikan kesempatan promosi atas prestasi kerja bagi pemangku pelaksana sistem perangkat lunak yang didukung dengan lingkungan kerja yang sesuai untuk menyelesaikan segala aktivitas atas pelaksanaan SAP dalam upaya mendukung optimalisasi bidang tugas pemerintahan daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mama Sudarma selaku Kepala Akuntansi BPKAD pada tanggal 1 Juli 2013 menyatakan:

“ Penerapan SAP ini di Pemerintah Kabupaten Jember tidak sepenuhnya mudah untuk diterapkan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Banyak sekali kendala dan hambatan yang perlu

diperhatikan dan ditingkatkan seperti masalah SDM, sistemnya dan hambatan lain yang masih ada untuk menerapkan SAP berbasis akrual ini”

Hasil yang ada sehubungan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Jember belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) karena masih menunggu pedoman umum yang akan dikeluarkan oleh Kemendagri, namun pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk melaksanakan dan memanfaatkan SAP dalam pertanggungjawaban APBD sebagai bentuk transparansi tugas menuju good governance.
- b. Sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, yang dijadikan pedoman dalam proses penyusunan LKPD adalah PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP Berbasis Akrual Penuh yang sifatnya sementara dalam implementasinya sudah cukup memadai dijadikan sebagai pedoman penyusunan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, masih sebagian kecil saja yang memahami teknis SAP, dan secara kualitas mungkin masih sangat perlu ditingkatkan karena pada umumnya pemahaman pegawai mengenai akuntansi pemerintahan masih lemah dan pemahaman tentang penerapan basis akrual masih kurang.
- d. Kurangnya Bintelk atau pelatihan terkait penerapan SAP berbasis akrual dari pemerintah pusat untuk bimbingan SAP No. 71 Tahun 2010.
- e. Kurangnya sosialisasi secara berkala.
- f. Belum dibangunnya software untuk mengakomodir ketentuan PP No. 71 Tahun 2010.

- g. Sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi terutama di masing-masing SKPD, seperti perangkat lunak untuk menyusun laporan pertanggungjawaban.
- h. Pemerintah daerah kurang memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP

Pemda Kabupaten Jember terkait dengan pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah Kemendagri bekerjasama dengan KSAP perlu rutin melakukan sosialisasi dan Bintek dengan penerapan basis akrual. Kondisi di daerah khususnya di Kabupaten Jember saat ini adalah kurangnya pemahaman terkait PP tersebut, sehingga sosialisasi dan Bintek sangat diperlukan.

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, LKPD dan Kabupaten Jember pada tahun 2011 masih berpedoman pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan PP No.71 Tahun 2010 dengan meningkatkan pemahaman melalui keikutsertaan dalam sosialisasi PP tersebut, meskipun narasumber berasal dari akademisi. Selanjutnya, untuk mengatasi kendala terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam bidang akuntansi, Pemerintah Kabupaten Jember berusaha mengikutsertakan SDM untuk mengikuti kursus akuntansi.

Secara Umum Kabupaten Jember cukup siap untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kesiapan Pemda Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap.
- b. Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, kurangnya BinteK atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi.
- c. Model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain Pengembangan SAP Berbasis Akruar sesuai dengan kebutuhan, penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akruar sesuai dengan kebutuhan, Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain:

- a. Penilaian kesiapan pegawai akuntansi dalam pemerintahan hanya menggunakan persepsi, tidak dinilai secara langsung dari hasil pelaksanaannya.
- b. Penelitian ini hanya mendeskripsikan tetapi tidak menjelaskan pengaruh dari masing-masing parameter terhadap kesiapan.

- c. Deskripsi karakteristik responden pada penelitian ini hanya mencantumkan jenis kelamin,usia,lama waktu bekerja dan latar belakang pendidikan, tetapi tidak mencantumkan pelatihan akuntansi yang diikuti oleh responden.
- d. Wawancara dalam penelitian ini belum sepenuhnya dikembangkan terkait dengan indikator pada parameter yang digunakan.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diajukan beberapa saran antara lain:

- a. Penilaian kesiapan tidak hanya diukur dari penilaian pegawai terhadap parameter tetapi juga didukung hasil implementasi atau evaluasi pelaksanaan secara riil tentang pelaksanaan SAP.
- b. Hendaknya diuji pengaruh parameter terhadap kesiapan SAP sehingga mampu melihat besar kontribusinya.
- c. Hendaknya mencantumkan pelatihan akuntansi sebagai bagian dari deskripsi karakteristik responden dalam penelitian.
- d. Pengembangan wawancara untuk mengupas indikator-indikator yang terdapat pada parameter kesiapan dalam pelaksanaan SAP berbasis aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Syukriy.2008.Basis Akuntansi Pemerintahan . (Online) ,[http : // syukriy .
wordpress.com/2008/06/28/basis-akuntansi-pemerintahan/](http://syukriy.wordpress.com/2008/06/28/basis-akuntansi-pemerintahan/). [November
2012]
- Bastian,Indra,2006, *Akuntansi Sektor Publik:Suatu Pengantar*,Jakarta,Erlangga.
- Bodnar, George H, and William S.Hopwood. 2002. Sistem Informasi. Akuntansi, Buku I. Jakarta: Penerbit salemba empat*
- Bungin,Burhan. 2008.*Penelitian Kualitatif:Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel, 2000. Infrastructure System Management & Optimization. Internasional Seminar “Paradigm & Strategy of Infrastructure Management” Civil Engeneering Departement Dipononegoro University.
- Grigg, Neil, 1988. Infrastructure Engineering and Management. John Wiley and Sons.
- Hartanto, Jogyanto. 2002. *Pengenalan Komputer*, Andi,Yogyakarta.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2002. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kieso,Donald E. Dkk. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid 1 . Terjemahan oleh Emil Salim. 2008. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mardiasmo.2002.Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat. (Online),artikel 1, No.4, http://www.ekonomi rakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm. [November 2012].
- Muchtar, A.M. 2002. Audit Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis.Edisi ke-1. Andi Offset, Yogyakarta
- Mulyana,Budi, penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-Negara Lain;Tren di Negara-Negara Anggota OECD
- Noerdiawan D,Iswahyudi,Maulidah,2007, *Akuntansi Pemerintahan*,Jakarta,
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

Pusat Litbang Pembangunan Dan Keuangan Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. 2010. Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Sap Berbasis AkruaI Penuh Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Jakarta

Ranupandjojo, Heidirachman. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Universitas Terbuka

Robert J. Kodoatie, 2003. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Jakarta: PT. Erlangga

Saleh, Z & Pendlebury M.W. 2002. Accruals Accounting in Government-Developments in Malaysia. *Asia Pacific Business Review*, 12 (4): 421-435.

Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi III*. Jakarta : Indonesia , Salemba Empat

Simanjuntak, Binsar. tanpa tahun. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art.7pdf>, [November 2012].

Tanjung, Abdul Hafiz, 2012, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI; Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*, Bandung, Alfabeta.

Tickell, Geoffrey. 2010. Cash To Accrual Accounting: One Nation's Dilemma. *International Business & Economics research Journal*, 9 (11): 71-78.

Tikk, Jutta. 2010. Accounting Changes In The Public Sector In Estonia. *Business: Theory and Practice*, 11 (1): 77-85.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Widjajarso, Bambang, 2008. Penerapan Basis AkruaI Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan

www.wikipedia.org diunduh tanggal 12 Januari 2013

Yanti, Widya. 2012. Analisis Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Studi Kasus Pada LAZ Yayasan Yatim Mandiri, LAZ Yayasan Rumah Zakat, LAZ Yayasan Dompot Dhuafa Jawa Timur), Seminar Skripsi tahun 2012 di Universitas Jember

Lampiran 1

DAFTAR PERNYATAAN (KUESIONER)

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri.

Pegawai Pemerintah Jember

di-

TEMPAT

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jember, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk memberikan informasi mengenai kesiapan pemerintah daerah kabupaten Jember dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuisisioner penelitian ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/Sdri yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini.

Hormat saya,

Peneliti

Petunjuk Pengisian

Nama :
Alamat :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :

Berilah tanda *Check List* () pada jawaban yang sesuai.

Keterangan :

- a. STS : Sangat Tidak Siap
- b. TS : Tidak Siap
- c. CS : Cukup siap
- d. S : Siap
- e. SS : Sangat Siap

I. Parameter Integritas

	Parameter Komitmen / Integritas meliputi indikator	Alternatif Jawaban				
		STS	T	CS	S	SS
1	Anda memiliki kesiapan komitmen utama untuk tugas dalam dengan baik hendaknya menjunjung azas, visi dan misi pemakaian SAP berbasis akrual					
2	Anda memiliki kesiapan disiplin serta memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasnya untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan sistem akuntansi pemerintahan					
3	Anda memiliki kesiapan dalam keberanian dalam bersikap, dalam melaksanakan tugas layanan publik dengan peningkatan melalui pendekatan SAP					
4	Anda memiliki kesiapan dukungan dasar dalam pelaksanaan administrasi publik dengan memanfaatkan SAP dalam bentuk peraturan perundangan dan maupun peraturan pendukung lainnya					
5	Pemerintah bertanggung jawab moral, terhadap rencana di aplikasikannya SAP dalam menunjang optimasi kinerja pemerintah					
6	Pemerintah memiliki inovasi dan obyektif untuk memanfaatkan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan					
7	Pemerintah untuk mempunyai sikap komitmen dan integritas pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					
8	Pemerintah untuk mempunyai prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					
9	Pemerintah daerah mempunyai/memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					

10	Pemerintah mempunyai strategi pendekatan yang humanis transparan, demokratis, dan akuntable dalam pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					
11	Pemerintah mempunyai motivasi untuk mencapai hasil kerja yang baik dengan pembangunan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					

II. Parameter untuk Kesiapan SDM terhadap Pelaksanaan SAP

	Parameter Kesiapan SDM	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintah untuk memiliki integritas dalam pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					
2	Pemerintah memiliki rasa kepuasan dalam bidang tugas dengan pelaksanaan SAP mendukung optimasi kinerja pemerintahan khususnya bidang keuangan					
3	Anda membutuhkan perhatian dan penghargaan (Reward and punishment untuk menyelesaikan segala aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP					
4	Pemerintah membutuhkan dukungan lingkungan kerja yang sesuai untuk menyelesaikan segala aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP					
5	Pemerintah memiliki alasan serta harapan terhadap optimasi bidang tugas pemerintahan daerah dengan pelaksanaan SAP di bidang keuangan					
6	Pemerintah memiliki / membutuhkan adanya dorongan dan kesempatan untuk berprestasi dari atasan untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah dengan menggunakan SAP di bidang keuangan					
7	Pemerintah membutuhkan ruangan kerja, dan lingkungan nyaman baik khususnya untuk mampu meningkatkan optimasi bidang tugas pemerintahan daerah dengan pelaksanaan SAP di bidang keuangan					

8	Pemerintah memiliki /kemauan untuk bekerja keras, disiplin dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					
9	Anda membutuhkan promosi atasan atas prestasi kerja yang diraih atas pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					
10	Anda memiliki loyalitas atas pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					
11	Anda memiliki kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					

III. Parameter Kesiapan Sarana Prasarana terhadap Pelaksanaan SAP

	Parameter Sarana Prasarana	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan sarana ruangan yang memadai khususnya untuk operasi perangkat SAP					
2	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana perangkat lunak yang memadai khususnya untuk operasi SAP					
3	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi yg berkesinambungan khususnya untuk operasi SAP					
4	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana administrasi yang memadai khususnya untuk operasi SAP					
5	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran yang memadai khususnya untuk operasi SAP					
6	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sumberdaya manusia berkualitas yang memadai khususnya untuk operasi SAP					

IV. Parameter Kesiapan Sistem Informasi terhadap Pelaksanaan SAP

	Parameter Sistem	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintah daerah mempunyai Platform pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana jangka Menengah maupun jangka pendek dengan transparansi, akuntabilitas, dalam bidang keuangan, membutuhkan dukungan SAP					
2	Pemerintah didukung oleh sistem mekanisme penyelenggaraan SAP clear dan clean dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam bidang keuangan					
3	Pemerintah didukung oleh sistem Manajemen Informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di tingkat pemerintah provinsi sampai kabupaten					
4	Pemerintah didukung oleh sistem dalam perangkat lunak SAP yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali					
5	Pemerintah didukung oleh pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP					
6	Pemerintah memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP					

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

RSP	Integritas											Kesiapan SDM										
	X1-1	X1-2	X1-3	X1-4	X1-5	X1-6	X1-7	X1-8	X1-9	X1-10	X1-11	X2-1	X2-2	X2-3	X2-4	X2-5	X2-6	X2-7	X2-8	X2-9	X2-10	X2-11
1	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3
2	2	3	2	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	4	3	4	5
3	3	3	4	4	5	5	5	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
4	4	3	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	5	3	3	4	3	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	5	3	5	5	3	3	4	4	5	4	5	3	4	3	4	4	4
6	3	4	4	5	4	4	3	5	5	5	5	5	3	4	5	4	5	4	3	4	4	4
7	3	4	4	4	4	5	5	3	5	3	4	5	3	3	4	5	5	4	3	3	4	3
8	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3
9	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	2	5	5	5	5	3	4	4	4	4
10	4	4	4	3	5	5	5	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4
11	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4
12	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4
13	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	5	3	4	3	4	4
14	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	5	4
15	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	5	4	5	3	4	3	3	5	2
16	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	3	5	3	4	5	4	4	4	3	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
18	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	2	2	4	2	2	3	4	4	5	4
19	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	2	5	5	5	4	3	3	4	4	4
20	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4
21	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3
22	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	3	2	4	4	3	5	4
23	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	5	3	5	3	3	3	2	2	3
24	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	2	3	4	3	5	5	3	3	3	3	3
25	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	4	3	4
26	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4
27	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3	2	3	3	2
28	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	4	3	5	5	3	3	3	3	2
29	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	3	3	4	4	5	4
30	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	5	4	4	5	4	3	3	4	4
31	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	3	3	4	4
32	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	3	2	2	3	5	5

Lampiran 2

RSP	Kesiapan Sarana Prasarana						Kesiapan Sistem Informasi					
	X3-1	X3-2	X3-3	X3-4	X3-5	X3-6	X4-1	X4-2	X4-3	X4-4	X4-5	X4-6
1	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	3	3
2	4	5	5	5	3	4	4	4	3	4	4	3
3	3	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3
4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	3	4	3
5	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4
6	4	5	5	5	4	4	4	5	3	2	3	3
7	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5
8	3	3	3	2	3	3	3	5	4	5	4	4
9	5	5	5	5	3	4	3	4	3	4	3	4
10	5	3	3	3	5	5	4	4	2	3	2	4
11	4	3	3	3	4	4	4	5	4	5	5	5
12	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4
13	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4	3	3
14	4	3	4	4	5	4	4	5	3	3	3	5
15	5	3	3	4	4	3	3	4	5	5	5	3
16	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5
17	4	3	4	3	4	5	3	5	5	4	5	5
18	4	3	4	4	4	4	3	4	5	5	5	3
19	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5
20	4	3	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5
21	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
22	3	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3
23	3	3	3	2	3	4	4	4	3	4	4	3
24	3	3	3	3	4	4	4	5	4	4	4	3
25	5	3	4	4	4	4	4	5	3	3	4	3
26	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4
27	3	2	3	3	4	4	4	5	3	2	3	3
28	3	3	3	3	4	4	4	5	4	5	5	5
29	3	5	5	5	3	3	3	5	4	5	4	4
30	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4
31	4	4	3	3	5	5	4	4	2	3	2	4
32	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5

Lampiran 3

HASIL UJI VALIDITAS DATA

Factor Analysis

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,682
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	138,750
	df	55
	Sig.	,000

Component Matrix^a

	Component
	1
X1-1	,557
X1-2	,600
X1-3	,580
X1-4	,674
X1-5	,688
X1-6	,597
X1-7	,514
X1-8	,801
X1-9	,774
X1-10	,579
X1-11	,608

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.

a. 1 components
extracted.

Factor Analysis

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,602
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	103,244
	df	55
	Sig.	,000

Component Matrix^a

	Component
	1
X2-1	,727
X2-2	,571
X2-3	,526
X2-4	,838
X2-5	,549
X2-6	,552
X2-7	,515
X2-8	,519
X2-9	,565
X2-10	,795
X2-11	,682

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.

a. 1 components
extracted.

Factor Analysis

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,678
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	85,107
	df	15
	Sig.	,000

Component Matrix^a

	Component
	1
X3-1	,550
X3-2	,899
X3-3	,927
X3-4	,943
X3-5	,514
X3-6	,555

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.

a. 1 components
extracted.

Factor Analysis

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,655
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	59,269
	df	15
	Sig.	,000

Communalities

	Initial	Extraction
X4-1	1,000	,004
X4-2	1,000	,103
X4-3	1,000	,684
X4-4	1,000	,768
X4-5	1,000	,776
X4-6	1,000	,331

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
X4-1	,567
X4-2	,520
X4-3	,827
X4-4	,877
X4-5	,881
X4-6	,575

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.

a. 1 components
extracted.

Lampiran 4

HASIL UJI RELIABILITAS DATA

Reliability

Scale: 0,60

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	32	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,818	11

Reliability

Scale: 0,60

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	32	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,713	11

Reliability

Scale: 0,60

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	32	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,692	6

Reliability

Scale: 0,60

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	32	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,724	6

Lampiran 5

HASIL ANALISIS FREKUENSI

Integritas

Frequencies

X1-1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	1	3,1	3,1	3,1
Cukup Siap	6	18,8	18,8	21,9
Siap	25	78,1	78,1	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X1-2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	7	21,9	21,9	21,9
Siap	21	65,6	65,6	87,5
Sangat Siap Sekali	4	12,5	12,5	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X1-3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	1	3,1	3,1	3,1
Cukup Siap	5	15,6	15,6	18,8
Siap	21	65,6	65,6	84,4
Sangat Siap Sekali	5	15,6	15,6	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X1-4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	4	12,5	12,5	12,5
Siap	21	65,6	65,6	78,1
Sangat Siap Sekali	7	21,9	21,9	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X1-5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	8	25,0	25,0	25,0
Siap	13	40,6	40,6	65,6
Sangat Siap Sekali	11	34,4	34,4	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X1-6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	3	9,4	9,4	9,4
Siap	20	62,5	62,5	71,9
Sangat Siap Sekali	9	28,1	28,1	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X1-7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	7	21,9	21,9	21,9
Siap	18	56,3	56,3	78,1
Sangat Siap Sekali	7	21,9	21,9	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X1-8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	1	3,1	3,1	3,1
Cukup Siap	14	43,8	43,8	46,9
Siap	11	34,4	34,4	81,3
Sangat Siap Sekali	6	18,8	18,8	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X1-9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	10	31,3	31,3	31,3
Siap	15	46,9	46,9	78,1
Sangat Siap Sekali	7	21,9	21,9	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X1-10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	12	37,5	37,5	37,5
Siap	15	46,9	46,9	84,4
Sangat Siap Sekali	5	15,6	15,6	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X1-11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	1	3,1	3,1	3,1
Cukup Siap	14	43,8	43,8	46,9
Siap	14	43,8	43,8	90,6
Sangat Siap Sekali	3	9,4	9,4	100,0
Total	32	100,0	100,0	

Kesiapan SDM

X2-1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	2	6,3	6,3	6,3
Cukup Siap	11	34,4	34,4	40,6
Siap	13	40,6	40,6	81,3
Sangat Siap Sekali	6	18,8	18,8	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X2-2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	5	15,6	15,6	15,6
Cukup Siap	17	53,1	53,1	68,8
Siap	10	31,3	31,3	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X2-3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	1	3,1	3,1	3,1
Cukup Siap	4	12,5	12,5	15,6
Siap	13	40,6	40,6	56,3
Sangat Siap Sekali	14	43,8	43,8	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X2-4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	10	31,3	31,3	31,3
Siap	15	46,9	46,9	78,1
Sangat Siap Sekali	7	21,9	21,9	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X2-5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	1	3,1	3,1	3,1
Cukup Siap	6	18,8	18,8	21,9
Siap	10	31,3	31,3	53,1
Sangat Siap Sekali	15	46,9	46,9	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X2-6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	2	6,3	6,3	6,3
Cukup Siap	10	31,3	31,3	37,5
Siap	10	31,3	31,3	68,8
Sangat Siap Sekali	10	31,3	31,3	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X2-7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Siap	1	3,1	3,1	3,1
	Cukup Siap	19	59,4	59,4	62,5
	Siap	12	37,5	37,5	100,0
	Total	32	100,0	100,0	

X2-8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Siap	3	9,4	9,4	9,4
	Cukup Siap	19	59,4	59,4	68,8
	Siap	10	31,3	31,3	100,0
	Total	32	100,0	100,0	

X2-9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Siap	1	3,1	3,1	3,1
	Cukup Siap	19	59,4	59,4	62,5
	Siap	12	37,5	37,5	100,0
	Total	32	100,0	100,0	

X2-10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	1	3,1	3,1	3,1
Cukup Siap	8	25,0	25,0	28,1
Siap	17	53,1	53,1	81,3
Sangat Siap Sekali	6	18,8	18,8	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X2-11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	3	9,4	9,4	9,4
Cukup Siap	7	21,9	21,9	31,3
Siap	20	62,5	62,5	93,8
Sangat Siap Sekali	2	6,3	6,3	100,0
Total	32	100,0	100,0	

Kesiapan Sarana Prasarana

X3-1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	11	34,4	34,4	34,4
Siap	16	50,0	50,0	84,4
Sangat Siap Sekali	5	15,6	15,6	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X3-2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	1	3,1	3,1	3,1
Cukup Siap	19	59,4	59,4	62,5
Siap	4	12,5	12,5	75,0
Sangat Siap Sekali	8	25,0	25,0	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X3-3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	12	37,5	37,5	37,5
Siap	12	37,5	37,5	75,0
Sangat Siap Sekali	8	25,0	25,0	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X3-4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	2	6,3	6,3	6,3
Cukup Siap	14	43,8	43,8	50,0
Siap	8	25,0	25,0	75,0
Sangat Siap Sekali	8	25,0	25,0	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X3-5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	6	18,8	18,8	18,8
Siap	21	65,6	65,6	84,4
Sangat Siap Sekali	5	15,6	15,6	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X3-6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	3	9,4	9,4	9,4
Siap	24	75,0	75,0	84,4
Sangat Siap Sekali	5	15,6	15,6	100,0
Total	32	100,0	100,0	

Kesiapan Informasi

X4-1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	7	21,9	21,9	21,9
Siap	24	75,0	75,0	96,9
Sangat Siap Sekali	1	3,1	3,1	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X4-2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Siap	12	37,5	37,5	37,5
Sangat Siap Sekali	20	62,5	62,5	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X4-3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	2	6,3	6,3	6,3
Cukup Siap	9	28,1	28,1	34,4
Siap	14	43,8	43,8	78,1
Sangat Siap Sekali	7	21,9	21,9	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X4-4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	2	6,3	6,3	6,3
Cukup Siap	6	18,8	18,8	25,0
Siap	11	34,4	34,4	59,4
Sangat Siap Sekali	13	40,6	40,6	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X4-5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Siap	2	6,3	6,3	6,3
Cukup Siap	9	28,1	28,1	34,4
Siap	10	31,3	31,3	65,6
Sangat Siap Sekali	11	34,4	34,4	100,0
Total	32	100,0	100,0	

X4-6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup Siap	13	40,6	40,6	40,6
Siap	9	28,1	28,1	68,8
Sangat Siap Sekali	10	31,3	31,3	100,0
Total	32	100,0	100,0	

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (*IN-DEPTH INTERVIEW*)

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 1 Juli 2013 / Senin
- b. Waktu mulai : 09.00 Wib
- c. Waktu selesai : 10.00 Wib

II. Identitas Informan

- a. Nama : Mama Sudarma
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Usia : 48 Th
- d. Pendidikan : S1
- e. Jabatan /pangkat : Kepala Akuntansi BPKAD

1. Menurut Bapak bagaimana kesiapan pegawai untuk menerapkan SAP berbasis akrual?
2. Bagaimana penilaian kesiapan dilihat dari parameter integritas dan komitmen?
3. Bagaimana penilaian kesiapan dari parameter sumber daya manusia yang ditekankan pada pegawai akuntansi yang akan melaksanakan menyatakan siap dalam menerapkan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010?
4. Bagaimana kendala dan hambatan penerapan sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010?

Jawaban Wawancara

1. Dari sisi pegawai, menurut saya telah siap untuk penerapan SAP berbasis akrual.
2. Dari parameter integritas dan komitmen pegawai cukup siap untuk penerapan SAP berbasis akrual.
3. Sangat siap. Pegawai yang berlatar belakang akuntansi sangat diperlukan dalam penerapan SAP berbasis akrual. Karena pengetahuan dan keahliannya tentu berbeda dengan pegawai yang berlatar belakang non akuntansi. Sayangnya hingga saat ini masih belum banyak pegawai yang berlatar akuntansi untuk bidangnya.
4. Penerapan SAP ini di Pemerintah Kabupaten Jember tidak sepenuhnya mudah untuk diterapkan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Banyak sekali kendala dan hambatan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan seperti masalah SDM, sistemnya dan hambatan lain yang masih ada untuk menerapkan SAP berbasis akrual ini.

Lampiran 6

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (*IN-DEPTH INTERVIEW*)

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 24 Juni 2013 / Senin
- b. Waktu mulai : 10.00 WIB
- c. Waktu selesai : 11.00 WIB

II. Identitas Informan

- a. Nama : Drs Kusni,M.M
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Usia : 43 Th
- d. Pendidikan : S2
- e. Jabatan /pangkat : Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pendidikan

1. Menurut Bapak bagaimana kesiapan pegawai untuk menerapkan SAP berbasis akrual?
2. Bagaimana penilaian kesiapan dilihat dari parameter integritas dan komitmen?
3. Bagaimana penilaian kesiapan dari parameter sumber daya manusia yang ditekankan pada pegawai akuntansi yang akan melaksanakan menyatakan siap dalam menerapkan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010?
4. Bagaimana kendala dan hambatan penerapan sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010?

Jawaban Wawancara

1. Menurut saya dari sisi pegawai atau SDM nya sudah siap untuk melaksanakan SAP berbasis akrual.
2. Dilihat dari sisi integritas dan komitmen, saya menilai cukup siap. Integritas dan komitmen itu penting dalam melaksanakan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya integritas dan komitmen menjadi landasan kuat untuk keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3. Sebenarnya SDM yang ada sudah cukup siap melaksanakan SAP berbasis akrual. Baik dari pegawai yang berlatar belakang akuntansi maupun tidak.
4. Kurangnya pelatihan atau sosialisasi dari pemerintah adalah salah satu hambatan dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Jika dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang intensif, menurut saya pada tahun 2015 dapat diterapkan SAP akrual secara baik.

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (*IN-DEPTH INTERVIEW*)

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal / Hari : 26 Juni 2013 / Rabu
- b. Waktu mulai : 09.00 Wib
- c. Waktu selesai : 10.00 Wib

II. Identitas Informan

- a. Nama : Ir Sri Handayani
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Usia : 35 Th
- d. Pendidikan : S1
- e. Jabatan / pangkat : Kasubag Keuangan Dispenduk

1. Menurut Ibu bagaimana kesiapan pegawai untuk menerapkan SAP berbasis akrual?
2. Bagaimana penilaian kesiapan dilihat dari parameter integritas dan komitmen?
3. Bagaimana penilaian kesiapan dari parameter sumber daya manusia yang ditekankan pada pegawai akuntansi yang akan melaksanakan menyatakan siap dalam menerapkan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010?
4. Bagaimana kendala dan hambatan penerapan sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010?

Jawaban Wawancara

1. Menurut saya pegawai yang ada cukup siap untuk melaksanakan SAP berbasis akrual.
2. Dilihat dari sisi integritas dan komitmen, saya melihat kesiapan dari para pegawai.
3. Saya melihat dari sisi pegawai yang berlatar belakang akuntansi telah siap melaksanakan SAP berbasis akrual. Sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual memang harus memperhatikan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan khususnya pegawai akuntansi yang akan mengerjakannya. Kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai akuntansi didukung dengan kesiapan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP nantinya.
4. Di samping pegawai berlatar belakang akuntansi yang kurang, kesiapan sarana prasarana yang mendukung harus diperhatikan juga. Adanya pelatihan yang intensif juga sangat diperlukan.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)

Dan diajukan untuk diuji pada tanggal 27 September 2013 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Saya juga menyatakan bahwa tulisan saya ~~menggunakan~~/ tidak menggunakan* perangkat lunak illegal serta ~~melanggar~~/ tidak melanggar* perjanjian dengan pihak ketiga. Skripsi ini sudah/ belum dipublikasikan* pada seminar ataupun jurnal baik sebagian atau seluruhnya kecuali sudah disebutkan dalam tulisan. Isi penelitian baik sebagian maupun seluruhnya ~~direncanakan~~/ tidak direncanakan* untuk diajukan untuk memperoleh paten.

Saya menyadari dan memahami konsekuensi pelanggaran untuk item-item diatas dan jika saya melakukan, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal diterima.

Jember, 30 September 2013

Memberi pernyataan



(Riz Setiawati Kusuma)
090810301007

*Coret yang tidak perlu